

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Permasalahan kesetaraan gender akan selalu menarik untuk diamati baik dalam skala nasional maupun global. Perempuan yang masuk dalam dunia politik, menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengan mereka. Hal ini membuat perempuan dalam dunia publik ataupun politik tidak begitu banyak terlibat. Bahkan ada gambaran umum bahwa, partisipasi perempuan dalam dunia publik maupun politik tidak kondusif.

Persoalan yang menyangkut hak, kedudukan dan status perempuan dalam dunia politik maupun publik selalu menjadi persoalan dalam masyarakat. Selama ini perempuan selalu terjebak dalam urusan-urusan yang berkaitan pada urusan rumah tangga, dan mengasuh anak. Akibat pembagian peran tersebut, partisipasi perempuan menjadi jauh tertinggal jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Namun, lambat laun paradigma tersebut mengalami perubahan seiring dengan kesadaran kaum perempuan. Kesadaran kaum perempuan tersebut mewujudkan optimalisasi peran politik bagi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam dunia politik maupun publik, kaum perempuan membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha untuk mewujudkan kepentingannya. Termasuk

dalam mengupayakan partisipasinya dalam sektor politik maupun dalam sektor publik. Dan dengan munculnya gerakan perempuan dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan dalam sektor politik maupun sektor lainnya. Dan diharapkan dapat menghapus paradigma dalam masyarakat bahwa perempuan hanya sebagai “rencang wingking” sehingga perempuan tidak lagi terjebak dalam urusan-urusan rumah tangga dan mengasuh anak saja.

Kawasan Eropa merupakan wilayah yang sebagian besar negaranya dikenal sebagai negara-negara industrial maju dengan iklim politik yang demokratis. Jumlah representasi perempuan di parlemen untuk kawasan Eropa ternyata lebih tinggi dibanding dengan kawasan-kawasan lainnya yaitu mencapai 31%. Terutama negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia dan Denmark) Angka tersebut dapat tercapai setelah masing-masing negara mengadopsi sistem quota gender.

Dari ulasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema “DINAMIKA GERAKAN PEREMPUAN DI NORWEGIA” sebagai judul skripsi. Oleh karena itu, penulis berusaha memaparkan dalam tulisan yang sistematis untuk memberikan deskripsi dari judul yang diajukan untuk skripsi ini.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini secara umum bertujuan untuk menggambarkan masalah dinamika gerakan perempuan perempuan di Norwegia dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wawasan serta pola pikir logis sistematis mahasiswa.

Selain itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melengkapi mata kuliah skripsi yang akan dijadikan syarat untuk memperoleh gelar sarjana ( S1 ) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Fenomena kesetaran gender yang terus berkembang membuat fenomena gender tersebut akan selalu menarik untuk diamati maupun dianalisa. Persoalan mengenai hak, kedudukan dan status perempuan disektor domestik serta publik membuat posisi perempuan selalu termarginalkan, ditambah lagi dengan banyaknya aturan-aturan pemerintah yang seringkali membuat peran perempuan menjadi tersudut dan lemah untuk berperan dalam sektor publik.

Gerakan Feminis Internasional muncul sejak abad 19 yang berakar dari barat, gerakan tersebut mulai di organisir sejak dibentuknya Konvensi tentang Hak Perempuan pertama di Seneca Falls New York pada tahun 1848<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> " *History of Feminism* ", <http://on.wikipedia.org/wiki/History-of-feminism>

Kemudian gerakan Feminis tersebut merembet keseluruh dunia termasuk juga pada Norwegia dimana perempuan disana merasa perlu untuk meruntuhkan sistem patriarki. Melihat kondisi perempuan di Norwegia yang selalu mendapatkan posisi nomor dua dibawah laki-laki. Dimana dalam bidang ekonomi perempuan Norwegia tidak mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki bahkan ada yang tidak diupah, dalam bidang pendidikan perempuan norwegia juga didiskriminasikan dimana perempuan hanya boleh belajar hal-hal tertentu saja seperti keperawatan ataupun hal-hal lain yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Hal ini menggerakkan perempuan Norwegia untuk memperbaiki kondisi dan status perempuan dalam pemerintahan maupun sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Hingga pada tahun 1884 untuk pertama kalinya gerakan perempuan muncul di Norwegia, gerakan perempuan ini berusaha untuk mempengaruhi masyarakat dengan nilai-nilai Feminisme, namun pada waktu awal mula munculnya gerakan perempuan mereka hanya mengembangkan isu-isu yang bersifat domestik (rumah tangga) saja, setelah itu Perempuan Norwegia mulai mengenal dan masuk kedalam gerakan perempuan. Dan perjuangan gerakan perempuan pun mengalami perkembangan yang semula hanya berurusan dengan isu-isu domestik saja isu-isu dalam bidang politik juga mulai diangkat. Karena partisipasi perempuan dalam politik jauh tertinggal dibanding dengan kaum laki-laki.

Sebelum tahun 1913 pemerintah Norwegia belum memberikan hak pilih dalam pemilu kepada perempuan, padahal perempuan merupakan

kelompok mayoritas dalam populasi penduduk. Perempuan tidak diberikan hak untuk turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik sehingga kepentingan perempuan tidak terrepresentasikan. Namun, perlahan paradigma tersebut mengalami pergeseran doktrinasi, seiring tumbuhnya kesadaran kaum perempuan untuk mewujudkan optimalisasi peran perempuan dalam politik maupun sektor-sektor publik.

Perempuan Norwegia mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilu sejak tahun 1913, namun hal tersebut masih bersifat diskriminatif karena hak pilih untuk laki-laki telah diberikan 15 tahun sebelumnya. Namun dimulai dari tahun 1913 itulah perempuan Norwegia selalu memberikan suara dalam setiap pemilu yang diselenggarakan oleh perempuan. Hal ini terlihat dengan jumlah suara yang diberikan oleh perempuan terus mengalami peningkatan walaupun beberapa kali mengalami penurunan namun penurunan itu tidak begitu drastik. Jumlah suara yang diberikan perempuan tersebut dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini:

Namun ironisnya Perempuan baru diberikan hak sebagai subjek politik dalam artian diberikan hak untuk dipilih sebagai anggota parlemen pada tahun 1921<sup>2</sup>. Selain itu baru pada tahun 1977 dibentuk kementerian urusan perempuan<sup>3</sup>. Dengan diberikannya perempuan hak untuk menjadi subjek politik membuat perempuan Norwegia dapat duduk dalam parlemen dan secara perlahan perempuan yang duduk dalam parlemen maupun yang duduk

---

<sup>2</sup> Joni Levenduski, *Women and European Politics: Contemporary Feminism & Public Policy*, Wheatsheaf, Brighton, 1986, hal.94

<sup>3</sup> ibid

sebagai kabinet terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari grafik

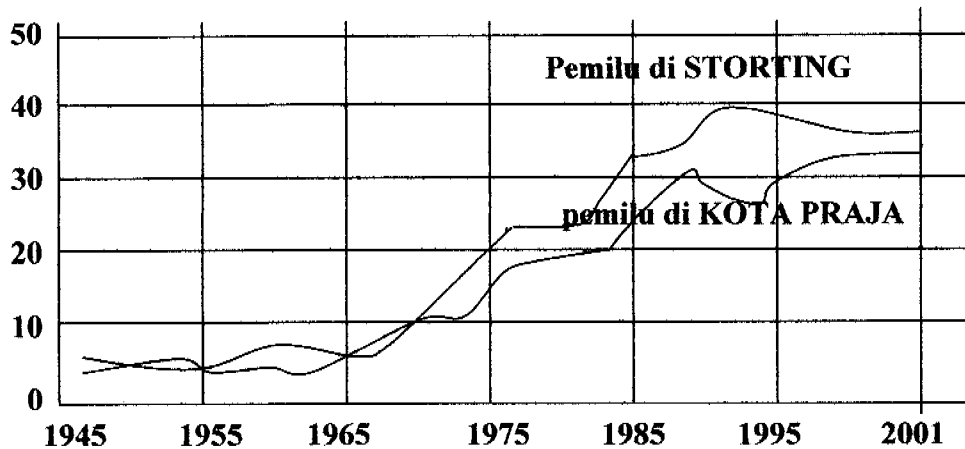
1.2 dibawah ini:

**Tabel 1.1 percentage voter turnout. Storting elections 1945-1993**

	Percentage voter turnout		
	Both sexes	Males	Females
1945	76.4	80.0	72.9
1949	82.0	85.3	78.9
1953	79.3	82.1	76.7
1957	78.3	80.4	76.3
1961	79.1	80.9	77.3
1965	85.4	86.8	84.1
1969	83.8	84.9	82.8
1973	80.2	82.1	78.4
1977	82.9	83.9	81.9
1981	82.0	82.6	81.4
1985	84.0	84.4	83.7

Sumber : statistic Norway 2005

**Grafik 1.2 Persentase Representasi Perempuan di Storting dan Kota Praja.**



sumber : Statistic Norway 2005

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa perjuangan perempuan di Norwegia mengalami keberhasilan dengan ditandai terus meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, dan Kota Praja. Tabel 1.1 maupun grafik 1.2 menunjukkan peningkatan jumlah pemilih dan juga mengalami peningkatan representasi perempuan di Parlemen dan Kota Praja sehingga terjadi pula peningkatan perempuan dalam susunan pemerintahan termasuk dalam ruang publik lainnya.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perjuangan gerakan perempuan yang muncul di Eropa pada tahun 1960-an. Gerakan perempuan di Norwegia dalam meningkatkan representatif perempuan di parlemen mengalami peningkatan dari kurang dari 10 persen pada awal 1970-an menjadi sekitar 40 persen pada pertengahan 1990-an. Kepemimpinan organisasi sebagian besar partai-partai politik Norwegia, hanya ada sedikit

pada komisi pemerintahan dan 32 persen duduk dalam komisi kotapraja. Ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari gerakan perempuan di Norwegia, yang merubah kondisi perempuan dengan sangat memuaskan dan mengagumkan.

Gerakan perempuan tersebut juga terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan perempuan di Norwegia, dan masing-masing kelompok kepentingan mempunyai misi yang dituju, bagaimanapun perbedaan misi itu tercipta mereka sama-sama mempunyai satu misi yang penting yaitu ingin memperbaiki kondisi perempuan di Norwegia. Kelompok kepentingan tersebut antara lain *The Norwegian Women and Family Association* (NWF), *The Norwegian Society of Rural Women* (NBK), *Norwegian Fisherman's Wives Association* (NFK), *Kvinnens Frivillige Beredskarp* (KBF) dan *The Norwegian Women Voluntary Defence League* (NFL). Sedangkan kelompok kepentingan yang memperjuangkan hak pilih dan kemudian berkembang memperjuangkan keterlibatan perempuan di politik yaitu *Norsk Kvinnesaksforening* (NKF) atau lebih dikenal sebagai *The Norwegian Association for the Rights of Women* pada yang berdiri tahun 1884<sup>4</sup>.

Selain itu semakin meningkatnya buruh perempuan juga memberikan motivasi pada kelompok kepentingan buruh untuk melindungi kepentingan buruh perempuan. *Trade Union* atau *Norwegian Federation of Trade Union* atau *Labour Organization* merupakan kelompok kepentingan buruh yang

---

<sup>4</sup> [www.euowrc.org/01.euowrc/14.euowrc-no/07.no-wrc.htm](http://www.euowrc.org/01.euowrc/14.euowrc-no/07.no-wrc.htm)



terbesar di Norwegia. Kelompok ini sangat aktif dalam memperjuangkan kepentingan massanya.

Dalam rangka meningkatkan representasi perempuan di parlemen gerakan perempuan melakukan upaya agar pemerintah melakukan reformasi hukum yang akan menghilangkan praktek ketidakadilan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesetaraan dalam semua aspek. Gerakan perempuan di Norwegia melakukan tekanan terhadap partai sayap kiri yang pada akhirnya partai-partai sayap kiri tersebut dapat menerima pemikiran feminis.

Walaupun jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah namun gerakan perempuan berusaha untuk memperbaiki kondisi perempuan di norwegia. Gerakan perempuan memperbaiki kondisi perempuan Norwegia dimulai dari lingkup terkecil dan terus melebar hingga pada dunia publik. Baik itu dalam bidang keluarga, pendidikan, ekonomi sampai pada bidang politik khususnya pembuat kebijakan (*Decision Maker*).

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “*Bagaimanakah Dinamika Gerakan Perempuan di Norwegia dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen ?*”

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab dari permasalahan tersebut di atas maka saya mencoba untuk menggunakan beberapa konsep yaitu :

### 1. Konsep Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa , pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik<sup>5</sup>. Gerakan perempuan dimasukkan kedalam kelompok kepentingan karena dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa gerakan perempuan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Gerakan perempuan hanya ingin menyadarkan kaum perempuan dan mengangkat atau memperbaiki posisi perempuan dalam bidang politik maupun bidang-bidang publik yang lainnya. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggota-anggota dalam gerakan perempuan tersebut memenangkan kedudukan politik berdasar pemilihan umum, gerakan perempuan itu sendiri tidak di pandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintah.

Jenis-jenis kelompok kepentingan<sup>6</sup> :

#### a) Kelompok Anomik

Kelompok Anomik terbentuk antara unsur-unsur dalam masyarakat secara seponatan dan hanya seketika, dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering sering

---

<sup>5</sup> Mas' oed, Mohtar Dr, dan, Macandrewa, Colin Dr, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada Universitas press, 1993 hal.53

<sup>6</sup> ibid hal. 54-56

tumpang tindih dengan bentuk partisipasi non-konvensional seperti, demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan lain sebagainya.

b) Kelompok Non-Assosiasional

Kelompok non-assosiasional ini jarang terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat kadang kala. Kelompok ini berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik

c) Kelompok institusional

Organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer. Kelompok kepentingan ini memiliki anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan lobby. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain disamping artikulasi kepentingan.

d) Kelompok Assosiasional

Kelompok assosiasional meliputi serikat buruh, kamar dagang dan lain sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari kelompok khusus, memakai tenaga staff professional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Basis organisasinya menempatkannya di atas kelompok non-assosiasional; taktik dan tujuannya sering diakui sah dalam masyarakat; dan dengan mewakili kelompok dan kepentingan yang luas, kelompok assosiasional dengan efektif bisa membatasi pengaruh kelompok anomik; non-assosiasional; dan institusional.

Dari beberapa jenis kelompok kepentingan tersebut maka gerakan perempuan di Norwegia yang dimaknai sebagai kelompok kepentingan termasuk kedalam kelompok yang terakhir yaitu kelompok asosiasi, karena kelompok perempuan di Norwegia menyatakan kepentingan dari perempuan – perempuan warga negara Norwegia.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya organisasi-organisasi perempuan seperti *Norsk Kvinnesaksforening ( NKF )* atau lebih dikenal sebagai *The Norwegian Association for the Rights of Women* pada tahun 1884 , selain itu ada organisasi *Kvinnerstemmerest Foreningen* atau sering disebut *The Female Suffrage Union* gerakan ini melakukan lobby-lobby terhadap pemerintah untuk memberlakukan hak pilih bagi perempuan dalam pemilu.

Selain itu dalam Norwegia masih ada beberapa kelompok kepentingan perempuan yang khusus memperjuangkan hak-hak perempuan mulai dari isu dalam lingkup keluarga, politik, ekonomi, pertahanan dan lainnya.

## **2. Konsep Feminis**

Pemikiran politik feminis dikonsepsikan sebagai pemikiran atau teori yang melihat pola hubungan antara laki—laki dan perempuan sebagai pola hubungan yang tidak setara, mengandung subordinasi dan penindasan, yang melihat masalah-masalah perempuan lebih sebagai masalah kekuasaan politik

ketimbang sebuah fakta yang alami, dan melihat masalah tersebut sebagai sesuatu yang penting bagi teori dan praktek politik<sup>7</sup>.

Sebagaimana filsafat politik, tidak ada teori feminis yang tunggal. Feminisme telah memunculkan berbagai pemikiran tentang kondisi perempuan. Ini tergambarkan dalam berbagai gerakan feminis dan kampanye kaum feminis. Seperti yang kita ketahui, Feminis sebagai sebuah ideologi terdiri dari beberapa kelompok diantaranya adalah<sup>8</sup>:

a. Feminisme Liberal

Aliran ini muncul sebagai kritik atas teori politik liberal yang menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan kebebasan individu, namun pada saat yang sama mendiskriminasi kaum perempuan. Asumsi dasar Feminisme Liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*Freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Kerangka kerja Feminisme Liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk didalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan.

Asumsi Feminisme Liberal mengenai tidak perlunya pembedaan kesempatan, karena perempuan adalah makhluk rasional juga. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai mengapa kaum perempuan dalam keadaan terbelakang atau tertinggal, Feminisme Liberal beranggapan bahwa hal itu

---

<sup>7</sup> Bryson, V., *Feminist Political Theory: An Introduction*, The MacMillan Press Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, RG21 2XS and London, 1992, hal.1

<sup>8</sup> Fakhri, Mansour, Dr, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 81-92

disebabkan oleh kesalahan “mereka sendiri”. Dengan kata lain, jika sistem sudah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Maka, jika kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan itu sendiri.

Jadi, bagi feminis liberal perempuan dan laki-laki adalah sama. Yang membuat mereka beda disebabkan karena adanya sebuah konstruksi sosial yang disengaja melalui sosialisasi oleh institusi-institusi sosial. Jadi, pada pola sosialisasi tersebut yang sudah diubah bukan tatanan sosial yang ada, sehingga perempuan mempunyai kesempatan atau *starting point* yang sama ketika bersaing dengan laki-laki.

#### b. Feminisme Radikal

Dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, Feminis Radikal menganggapnya berakar pada jenis kelamin itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Dengan demikian kaum laki-laki secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan, dari situ aliran Feminis Radikal menganggap bahwa penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki adalah bentuk penindasan terhadap kaum perempuan.

Bagi perempuan patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hierarki seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan privilege ekonomi. Gerakan Feminis Radikal beranggapan bahwa revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk merubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka sendiri terhadap

kaum laki-laki. Dengan kata lain, bagi gerakan Feminis Radikal, revolusi dan perlawanan atas penindasan perempuan bisa dalam bentuk yang sangat personal : urusan subjektif individu perempuan. Sumbangan Feminis Radikal ini sangatlah besar pada gerakan perempuan secara umum.

c. Feminisme Marxis

Kelompok ini menolak keyakinan kaum Feminis Radikal yang menyatakan bahwa biologi sebagai dasar perbedaan gender. Bagi penganut Feminis Marxis penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas Kapitalisme. Dan mereka juga beranggapan bahwa, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat struktural. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap patriarki ataupun kaum laki-laki sebagai permasalahan, akan tetapi sistem Kapitalisme yang sesungguhnya merupakan penyebab masalahnya.

d. Feminisme Sosialis

Menurut Jagger (1983) aliran ini melakukan sintesis antara metode histories materialis Marx dan Engels dengan gagasan *personal is Political* dari kaum Feminis Radikal. Bagi Feminisme Sosialis penindasan perempuan terjadi di kelas manapun, bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Atas dasar itu mereka menolak visi misi Marxis klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender. Sebaliknya, Feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Oleh Karena itu, analisis patriarki perlu dikawinkan dengan analisis kelas.

Dengan demikian kritik terhadap eksploitasi kelas dari sistem Kapitalisme harus dilakukan pada saat yang sama dengan disertai kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi dan marginalisasi atas kaum perempuan.

Gerakan Feminis Internasional mulai muncul sejak abad 19 tepatnya pada tahun 1848, Konvensi pertama tentang hak perempuan di Seneca Falls New York. Dari munculnya gerakan ini menandakan mulai sadarnya kaum perempuan akan persepsi bahwa perempuan telah mengalami penindasan oleh kaum laki-laki dalam masyarakat yang patriarki. Demikian juga dengan masyarakat perempuan di Norwegia, mereka mulai tersadar hingga pada tahun 1884 muncul gerakan perempuan, yang bertujuan untuk mendobrak sistem patriarki.

Gerakan perempuan di Norwegia melihat hampir 50% penduduk Norwegia adalah perempuan. Namun, nilai mayoritas dari kaum perempuan di Norwegia hanyalah terkandung dalam kategori populasi penduduk saja. Sedangkan dalam kehidupan sosial politik status perempuan dalam masyarakat justru termasuk dalam kelompok minoritas. Di Norwegia juga tercipta sebuah stigma yang membedakan peran antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Bahkan pemerintah juga melegalkan ketimpangan dalam rumah tangga tersebut dengan Undang-Undang perkawinan tahun 1888, yang menyatakan bahwa "istri sebaiknya mematuhi atau tunduk terhadap suami" konsekuensinya adalah perempuan yang telah menikah akan selalu di kendalikan oleh laki-laki, dalam artian perempuan tidak memiliki otoritas



dalam keluarga baik secara hukum maupun dalam proses pengambilan keputusan keluarga<sup>9</sup>.

Perempuan tidak diperkenankan bekerja diruang publik kalaupaun ada perempuan yang bekerja diruang publik mayoritas adalah pekerja buruh industri, buruh tani dan nelayan. Pada akhir tahun 1960-an gerakan perempuan Norwegia berjuang untuk menekan pemerintah agar melakukan reformasi hukum yang akan menghilangkan praktek ketidakadilan gender yang telah terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, akses untuk mendapatkan pelayanan publik maupun terjadinya perbedaan pendapatan.

Gerakan perempuan berjuang untuk menghilangkan ketidakadilan gender dengan membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang terbentuk berdasarkan profesi tiap-tiap perempuan Norwegia. Seperti : *The Norwegian Women and Family Association* (NWF), *The Norwegian Society of Rural Women* (NBK), *Norwegian Fishermen's Wives Association* (NFK), *Kvinnens Frivillige Beredskarp* (KBF), dan *The Norwegian Women Voluntary Defence League* (NFL).

Untuk menghilangkan ketidakseimbangan gender tersebut kelompok-kelompok kepentingan tersebut mereka melakukan lobby-lobby terhadap pemerintah, mendesak pembentukan aliansi antara faksi perempuan partai politik dengan kelompok kepentingan perempuan. Kemudian kelompok perempuan tersebut mulai mengintegrasikan diri mereka ke dalam partai

---

<sup>9</sup> Morkhagen Pernilleclonne, "The Position of Women in Noorway" at <http://odin.dep.no/ud/nornytt/uda-147.html>

politik dengan kelompok kepentingan perempuan. Kemudian kelompok perempuan tersebut mulai mengintegrasikan diri mereka ke dalam partai politik. Karena divisi perempuan, partai politik merupakan sarana yang strategis untuk mengadakan pelatihan politik dan mencapai peningkatan kompetensi dalam mempromosikan isu – isu perempuan.

Dari perjuangan-perjuangan tersebut maka untuk pertama kali pada tahun 1913, perempuan memperoleh hak untuk menjadi pemilih dalam pemilu. Selain itu pemerintah membuat Undang-Undang tentang kesetaraan gender pada tahun 1979 dan yang paling penting adanya pemberlakuan sistem quota gender. Sistem quota gender juga berlaku dalam *Norwegian Labour Party*, partai tersebut juga menerapkan sistem quota gender 40 % disetiap nominasi dan pemilihan.

Dari keberhasilan perjuangan kelompok kepentingan perempuan membuat perempuan tidak lagi menjadi kelas kedua. Bahkan pada tahun 1989 merupakan puncak keberhasilan kelompok kepentingan karena pada tahun 1989 representasi perempuan di parlemen paling tinggi.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa gerakan perempaun di Norwegia termasuk dalam paham Feminis Radikal, karena gerakan tersebut lebih menitik beratkan kesalahann terpuruknya posisi perempuan adalah akibat dari sistem patriarki.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Penulis membatasi penulisan ini dengan membahas Dinamika Gerakan Perempuan di Norwegia dimulai dari tahun 1979–1989. Pada tahun 1979 gerakan perempuan dinilai berhasil karena pada tahun tersebut pemerintah Norwegia membentuk Undang-Undang kesetaraan gender. Dan pada tahun 1989 merupakan masa di mana representasi perempuan mencapai tingkat tertinggi.

Jangkauan penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk mengikutkan berbagai fenomena dan realita yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, walaupun berada di luar jangkauan yang telah ditentukan.

## **G. Metode penelitian**

Dalam penulisan ini metode yang dilakukan bersifat deskriptif, yakni menjelaskan permasalahan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. maka pengumpulan data–data atau informasi didapat dari berbagai media cetak seperti buku, majalah, dan koran. Dan juga dari media elektronik seperti televisi, radio, maupun internet yang mendukung tersusunnya skripsi ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistem penulisan dimana disini akan dijelaskan point–point apa saja dalam penulisan

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang memuat Tujuan Penelitian,  
Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka

Pemikiran, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Menjelaskan tentang sistem Politik di Norwegia, yang menjabarkan tentang Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Norwegia.

Menjelaskan tentang Kondisi Umum Perempuan di Norwegia meliputi Populasi dan Kondisi Umum Perempuan di Norwegia dan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Parlemen. Dimana populasi dan Kondisi Umum Perempuan di Norwegia juga menjabarkan tentang kehidupan keluarga, kehidupan politik, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan.

BAB III : Menjelaskan tentang perkembangan Gerakan Perempuan di Norwegia dalam Meningkatkan Representasi Perempuan di Parlemen Yang meliputi Gerakan Perempuan tahun 1884-1930, Gerakan Perempuan tahun 1950 dan Gerakan Perempuan tahun 1960-1980an.

BAB IV : Kesimpulan.